



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG



FERY AFRIYANTO
NIP. 19700409 199603 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kebijakan daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum”
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan,
 - b. Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah kebijakan yang ditetapkan} / \text{Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan}) \times 100 \%$
 - c. Tercapai 97,00% Formulasi Perhitungan : $(95,00/97,08) \times 100\%$
 - Capaian indikator (a.) Persentase kebijakan daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) Program, yakni Program Pemerintahan Otonomi Daerah, Program fasilitasi dan koordinasi hukum, Program Kesejahteraan Rakyat
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa”
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa,
 - b. Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah kebijakan yang ditetapkan}$

- /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 %.
- c. Tercapai 100% Formulasi Perhitungan : $(95/100) \times 100\%$
- Capaian indikator (a.) Persentase kebijakan daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) Program, yakni Program Pemerintahan Otonomi Daerah, Program fasilitasi dan koordinasi hukum, Program Kesejahteraan Rakyat.
3. Capaian sasaran strategis 3 “ Meningkatkan Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi dan layanan administrasi Sekretariat Daerah”
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan ,
 - b. Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah kebijakan yang ditetapkan} / \text{Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan}) \times 100\%$
 - c. Tercapai 100 % Formulasi Perhitungan : $(95/100) \times 100\%$
 - Capaian indikator (a.) Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan yang ditetapkan sebanyak 1 (Satu) Program, yakni Program Penataan Organisasi
4. Capaian sasaran strategis 4 “Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Setda”:
Meningkatnya Pelayanan Internal PD setda : Indeks Kepuasan pelayanan Internal PD Setda.
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Formulasi Perhitungan : Survey Pelayanan Publik
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang

urusan Pemerintahan

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 84%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 91,46%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai/sesuai *) dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai $(81.023.754.535/88.589.093.931) \times 100\% = 91,46\%$.
- Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.

Ada beberapa sasaran yang belum mencapai target:

- Persentase kebijakan daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 95 % terjadi penurunan sebesar 90,22%.
- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 95% terjadi penurunan sebesar 70,89 %.
- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi dan layanan administrasi Sekretariat Daerah Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 95% terjadi penurunan sebesar 78,85%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Kapasitas Birokrasi yang rendah : kualitas dan kompetensi ASN yang belum optimal dapat mempengaruhi hasil kerja dan pengambilan keputusan

2. Ketidakjelasan peran : kurangnya kejelasan mengenai peran dan tanggungjawab dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas
3. Birokrasi yang panjang : proses administrasi yang panjang dan kurang efisien sering menjadi kendala internal dalam penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik
4. Seringnya kebijakan yang berubah membuat terlambatnya proses laporan tepat waktu.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3 Isu-isu Strategis	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar II.1. Website Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Bab I berisi :

1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscuting kaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

“Pohon Kinerja”

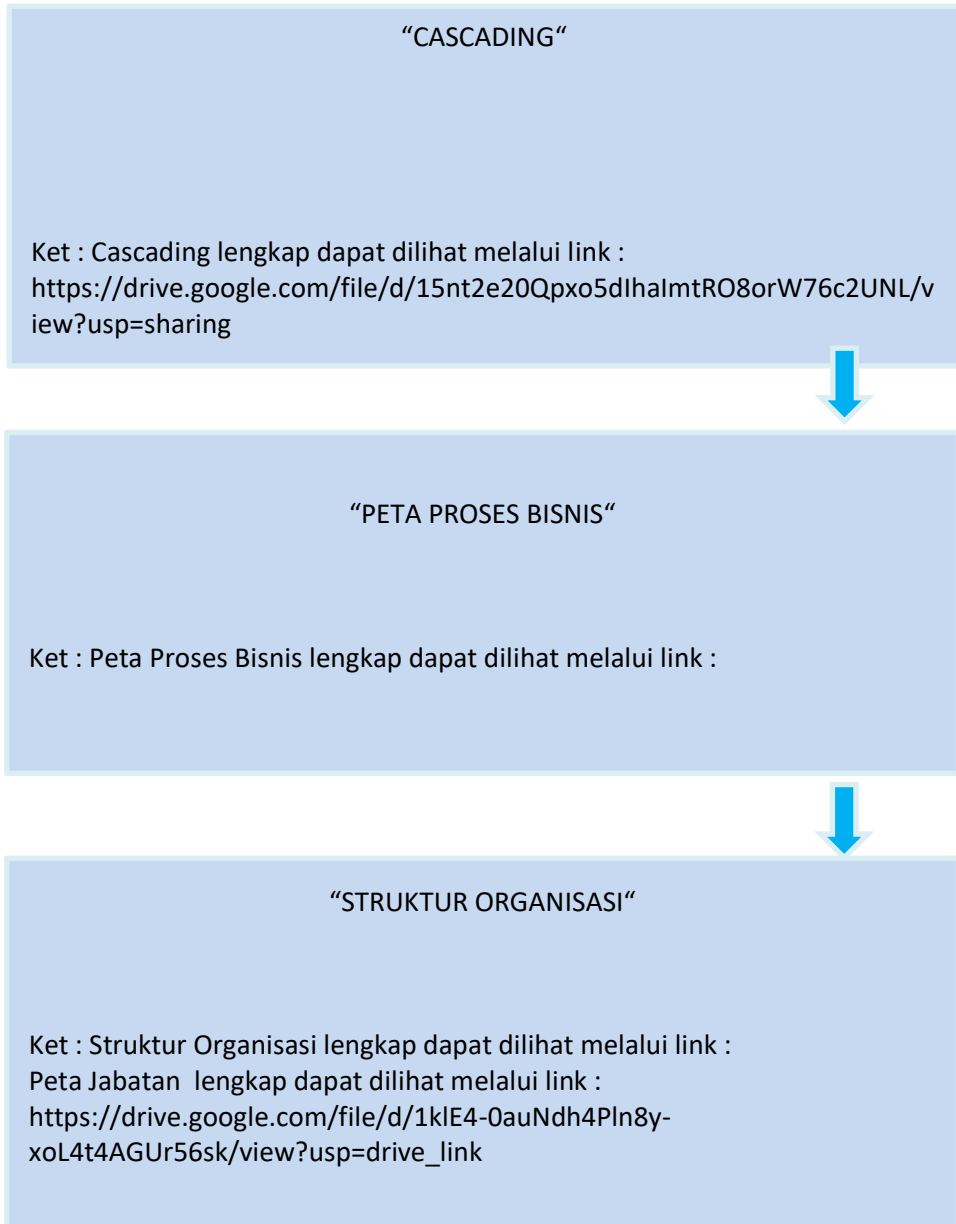
Ket : pohon kinerja lengkap dapat dilihat melalui link :
https://drive.google.com/file/d/1KyB5bHrofWrjmsr29rmmKCryHDsr_7VR/view?usp=drive_link

1.2 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

(halaman ini dapat di buat landscape)




1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Adapun Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan Administratif dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh atasan



PETA JABATAN
(pdf Peta Jabatan)

Ket : Peta Jabatan lengkap dapat dilihat melalui link :
https://drive.google.com/file/d/1kLE4-0auNdh4Pln8y-xoL4t4AGUr56sk/view?usp=drive_link

1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
2. Belum efektifnya penyelenggara tugas pokok dan fungsi kelembagaan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
4. Belum optimalnya pengendalian pembangunan
5. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan
6. Belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
7. Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatnya

budaya taat hukum

8. Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian
9. Belum optimalnya pembinaan terhadap BUMD.
10. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan rakyat, dan.
11. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum dan otonomi daerah.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMP UAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Eselon 1	1		1					1			1	
2	Eselon 2	14	3	1	0	0	1	0	1	0		14	0
3	Eselon 3	24	1	2	0	0	3	1	2	0		20	4
4	Eselon 4	8	1	0	0	0	1	1	0	0		4	4
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	85	9	4	4	0	17	9	4	4		34	51
2												
3	Dst.....												
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Pelaksana	128	21	1	7	13	48	27	1	7	13	70	58
2												
3	Dst.....												
D	PPPK/PPPTK PW												
1	PPPK	42		26		17	14	1	25		17	28	14
2	PPPK PW	158	56	2	22	104	158	56	2	22	104	95	65
3	Dst.....												

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 223 orang (48,48%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 58 orang (12,61%), D3 sebanyak 21 orang (4,57%), SLTA sebanyak 112 orang (24,35%), SLTP sebanyak 11 orang (2,39%), Paket C 20 Orang (4,35%), dan Paket B 2 Orang (2,39%) Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai Laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		
	tanah		106.777.751.377,00
2	Peralatan dan mesin		
	alat besar		5.691.787.968,00
	alat angkutan		41.839.968.450,00
	alat bengkel dan alat ukur		78.060.000,00
	alat pertanian		32.000.000,00
	alat kantor dan rumah tangga		34.298.046.437,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar		3.016.360.349,00
	alat kedokteran dan kesehatan		128.100.000,00
	alat laboratorium		186.720.000,00
	alat persenjataan		0,00
	komputer		8.864.014.654,00

	alat eksplorasi		0,00
	alat pengeboran		0,00
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		0,00
	alat bantu eksplorasi		0,00
	alat keselamatan kerja		99.750.000,00
	alat peraga		0,00
	peralatan proses/produksi		0,00
	rambu – rambu		0,00
	peralatan olah raga		81.475.000,00
3	Gedung dan bangunan		146.699.972.779,00
	bangunan gedung		146.387.252.779,00
	monumen		0,00
	bangunan menara		312.720.000,00
	tugu titik kontrol/pasti		0,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan		6.757.828.962,00
	jalan dan jembatan		625.905.962,00
	bangunan air		58.494.000,00
	instalasi		4.048.938.000,00
	jaringan		2.024.491.000,00
5	Aset tetap lainnya		350.079.950,00
	bahan perpustakaan		120.190.000,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra		229.889.950,00
	hewan		0,00
	biota perairan		0,00
	tanaman		0,00
	barang koleksi non budaya		0,00
	aset tetap dalam renovasi		0,00

6	Konstruksi dalam pengerjaan		89.155.000,00
	konstruksi dalam pengerjaan		89.155.000,00
7	dll.		1.523.939.941,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00
Total			354.991.070.926,00

Kendaraan operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni unit kendaraan dinas jabatan, unit kendaraan operasional, unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati : Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah/belum *) memadai. Hanya saja sebanyak % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000 an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2026

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	164.958.455.462	1.072.082.200			166.030.537.662
2025	121.401.801.333	5.577.935.300			126.979.736.633

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan*) Total anggaran belanja sebesar Rp 126.979.736.633 Hal ini menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) anggaran untuk membiayai program/kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya meningkatkan tata kelola pemerintahan Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-

2025

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2025
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tufoksi) perangkat daerah
5. Kebijakan nasional
6. Regulasi yang berlaku
7. Saran atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah, 2023-2026

(tabel ini dapat di buat landscape)



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
								2023	2024	2025	2026		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	Mewujudkan kebijakan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	%	95	95	95	95	95	95	
				Meningkanya kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	%	95	95	95	95	95	95	
				Meningkanya kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	%	95	95	95	95	95	95	
2.		Pencapaian RB PD SETDA	Mewujudkan reformasi birokrasi PD SETDA yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	B	77,00	77,05	78	78,05	79	79	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat
		Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Fasilitas dan Koordinasi Hukum
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Mengembangkan Usulan Kebijakan daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Usulan Kebijakan daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan
		Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan
		Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan jasa	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan jasa
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Mengembangkan Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi
4	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Mengembangkan Pelayanan internal setda	Mengembangkan Pelayanan internal setda

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket.
1. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	1.1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp3.075.959.600,00	Rp1.984.969.900,00	
	1.1.1. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp427.087.850,00	Rp286.804.650,00	
	1.1.2. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp2.293.133.750,00	Rp1.396.323.000,00	
	1.1.3. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp355.738.000,00	Rp301.842.250,00	
	1.2. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp35.812.645.925,00	Rp29.325.127.775,00	
	1.2.1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Rp11.383.804.450,00	Rp11.031.467.600,00	
	1.2.2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp23.600.148.200,00	Rp17.712.608.250,00	
	1.2.3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp828.693.275,00	Rp581.051.925,00	
	1.3. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp1.025.034.600,00	Rp631.795.150,00	
	1.3.1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp861.926.300,00	Rp472.066.100,00	
	1.3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp163.108.300,00	Rp159.729.050,00	
2. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan jasa	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp796.012.000,00	Rp482.278.400,00	
	1.2 program penunjang urusan pemerintahan	Rp94.361.100,00	Rp49.944.200,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp94.361.100,00	Rp49.944.200,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp620.334.900,00	Rp389.463.600,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp126.722.200,00	Rp113.399.500,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Rp201.664.400,00	Rp109.562.900,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Rp291.948.300,00	Rp166.501.200,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp81.316.000,00	Rp42.870.600,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp41.695.600,00	Rp42.870.600,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp39.620.400,00	Rp21.175.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp1.152.148.674,00	Rp822.857.974,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp306.323.000,00	Rp256.546.500,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp627.322.474,00	Rp419.198.774,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp218.503.200,00	Rp147.112.700,00	

3. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Penataan Organisasi dan Pelayanan umum	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp1.032.369.600,00	Rp753.983.600,00	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp384.502.850,00	Rp276.847.250,00	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp647.866.750,00	Rp477.136.350,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp91.556.386.540,17	Rp92.978.723.834,17	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp46.958.158.972,00	Rp45.873.248.906,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp260.000.000,00	Rp260.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp12.655.539.500,00	Rp10.945.128.950,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.504.209.400,00	Rp5.528.385.800,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp12.173.952.600,00	Rp12.996.331.150,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp8.849.568.300,00	Rp6.800.465.300,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp2.902.272.328,17	Rp2.902.272.328,17	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp3.077.394.900,00	Rp3.077.394.900,00	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp1.759.500.000,00	Rp1.723.500.000,00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Rp2.799.999.940,00	Rp2.751.996.500,00	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	Rp 98.637.911.014,17	Rp 97.654.608.858,17		

- **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

188.4/14/IV/2024).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

	serta Pengadaan Barang/Jasa	pembangunan serta pengadaan barang/jasa				
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	Nilai	78,05	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp3.075.959.600,00
		Program Kesejahteraan Rakyat	Rp35.812.645.925,00	
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp1.025.034.600,00	
2	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp620.334.900,00	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp81.316.000,00	
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp1.152.148.674,00	
3	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	Program Penataan Organisasi	Rp1.032.369.600,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp91.556.386.540,17	

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “ agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja *menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya*”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	Nilai	78,05	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
----	--	-------------------	-------	-------	--	--

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp3.075.959.600,00
		Program Kesejahteraan Rakyat	Rp35.812.645.925,00	
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp1.025.034.600,00	
2	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp620.334.900,00	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp81.316.000,00	
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp1.152.148.674,00	
3	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	Program Penataan Organisasi	Rp1.032.369.600,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp91.556.386.540,17	

2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	%	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	Nilai	78,05	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp3.075.959.600,00
		Program Kesejahteraan Rakyat	Rp35.812.645.925,00	
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp1.025.034.600,00	
2	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp620.334.900,00	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp81.316.000,00	

		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp1.152.148.674,00	
3	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	Program Penataan Organisasi	Rp1.032.369.600,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp91.556.386.540,17	

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran berkurang 38,96% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan belanja Pegawai
 2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
- **Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025**

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat www.instagram.com Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti (sebutkan layanan pada aplikasi)

**Gambar II.2. Website Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Screenshoot aplikasi



BAB 3



Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025
*(tabel ini dapat di buat landscape)
(diisi dengan semua sasaran dan indikator sasaran)*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	%	95	90,22	95	97,00	100	%	95
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	%	95	70,89	95	100	100	%	95
3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	%	95	78,46	95	100	100	%	95
4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	Nilai	77,00	77,05	78,05	91,46	100 %	Nilai	79,00

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- 3.1.1. Sasaran : 1. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum,**
- 2. Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa,**
- 3. Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi dan**

4. Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda

Kinerja sasaran 1. Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum dengan indikator Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. 2. Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa dengan indikator Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa, , Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi dengan indikator dengan indikator Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda diukur dengan indikator Nilai RB PD Setda, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Formulasi Perhitungan : Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 %
2.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	Formulasi Perhitungan : Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 %

3.	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan:	Formulasi Perhitungan : Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 %
4.	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	Penilaian survey internal PD

Kinerja sasaran Meningkatkan kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 90.22% atau sebesar 90.22% dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 70,89% atau sebesar 70,89% dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kebijakan Daerah di bagian Meningkatkan Kebijakan Daerah di Bagian Penataan Organisasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah kebijakan yang ditetapkan /Jumlah Kebijakan daerah yang dikeluarkan)x100 % Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 78,85% atau sebesar 78,85% dari target 95 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat

Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator/Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	95	93,62	88,94	95	97,00	100	95	95
	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	95	100	100	95	100	100	95	95
	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan	95	100	100	95	100	100	95	95
	Nilai RB PD Setda	78,05	92,56	100	78,05	91,46	100 %	79	79

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan,

kesejahteraan rakyat dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 97, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 95 % (terlampai). Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 93. % (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum mengalami peningkatan sebesar (0,5) %.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah mempunyai indikator Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun formula perhitungan: $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan}) \times 100\%$.
2. (Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator persentase usulan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat yang tersusun formula perhitungan: $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah Yang Disusun} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah Yang Diusulkan}) \times 100\%$.
3. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum dengan indikator Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun formula perhitungan: $\text{Jumlah usulan kebijakan} / \text{jumlah rumusan kebijakan dibidang hukum} \times 100 \%$.
4. Program Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Indikator Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun formula perhitungan: $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan}) \times 100\%$
5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa dengan indikator Persentase Usulan Kebijakan Daerah di bidang

Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun formula perhitungan:
(Jumlah realisasi Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan / Jumlah target Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan) X 100%.

6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%
7. Program Penataan Organisasi dengan indikator (Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai Sakip PD Setda
Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informatika,
- Kerjasama yang baik antara TU di Biro-biro serta Perencana SETDA,
- Kegiatan merupakan kegiatan yang Rutin dilaksanakan.
- Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika, Pendidikan, Keterampilan dan Manajemen Kepemimpinan

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Manajemen Kepemimpinan,
- Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait,
- Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi.
- Masih Perlu ditingkatkan lagi Koordinasi dengan Bagian.
- Jumlah Pegawai Pelaksana yang Kurang Memadai
- Keterlambatan pencairan dari kegiatan berjalan

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Upaya perbaikan permasalahan di Sekretariat Daerah (Setda) ke depan berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis digital, mengingat perannya sebagai pusat koordinasi kebijakan daerah,
- Upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi, klarifikasi peran dan tanggung jawab, investasi dalam pengembangan SDM, dan perbaikan proses pengambilan keputusan, Setda dapat meningkatkan kinerjanya dan mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum Formulasi Perhitungan : $95,00/97,00 \times 100\% = 92,15\%$	Nihil	95	Nihil	97,00	Nihil	100 %
2.	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa Formulasi Perhitungan : $95,00/100 \times 100\% = 95,00\%$	Nihil	95	Nihil	100	Nihil	100
3.	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan Formulasi Perhitungan : $95,00/100 \times 100\% = 95,00\%$	Nihil	95	Nihil	100	Nihil	100

4.	Nilai RB PD Setda Formulasi Perhitungan : Survey Pelayanan Internal setda	Nihil	78,05	Nihil	91,46	Nihil	100
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Catatan Penting:

Informasi realisasi kinerja tahun 2025 secara lengkap (seperti pada tabel yang Anda lampirkan untuk 2025) baru akan tersedia secara resmi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun pada awal tahun 2026.

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator..... berada diatas/dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator berada diatas/dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar %

3.1.1.1. Data Dukung Capaian persentase Kebijakan di bagian Pemerintah, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui Program Pemerintahan dan Otonomi daerah, Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Pogram Kesejahteraan Rakyat

- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah melekat pada Bidang Pemerintahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 286.804.650,00
 - Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp .1.396.323.000,00
 - Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan anggaran sebesar Rp Rp301.842.250,00
- Pogram Kesejahteraan Rakyat melekat pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yaitu:

- Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dengan anggaran sebesar Rp. 11.031.467.600,00
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 581.051.925,00
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada bidang Hukum yaitu:
 - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 472.066.100,00
 - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp 159.729.050,00

Gambar III.1

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di biro hukum, kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Fasilitasi Ceramah Agama Ruwah Kubur Desa Keretak Dan Keretak Atas Kabupaten Bangka Tengah</p>

		<p>INDEKS REFORMASI HUKUM</p>
		<p>Biro Hukum</p>
		<p>Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

Program pemerintahan dan otonomi daerah melekat pada Biro Pemerintahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Dengan Anggaran Sebesar Rp286.804.650,00, Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Anggaran Rp1.396.323.000,00 Dan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama

Daerah Rp301.842.250,00

Program Kesejahteraan Rakyat melekat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Dengan Anggaran Sebesar Rp11.031.467.600,00, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Dengan Anggaran Rp 17.712.608.250,00 Dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Rp 581.051.925,00

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Dengan Anggaran Sebesar Rp 472.066.100,00 dan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Dengan Anggaran Rp Rp159.729.050,00

3.1.1.2. Data Dukung Capaian persentase Kebijakan di bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, melalui Program Perekomian dan Administrasi Pembangunan, Program Kebikan Administrasi Pembangunan dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- Program Perekonomian dan Pembangunan pada bidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan yaitu:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 49.944.200,00
 - Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp113.399.500,00
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 42.870.600,00
- Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 822.857.974,00
- Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
 - Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 256.546.500,00
 - Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 419.198.774,00
 - Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 147.112.700,00.

Gambar III.2

Program Perekonomian dan Pembangunan , Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di Perekonomian dan administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		<p>Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p>

		<p>Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</p>
		<p>kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa</p>
		<p>Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dengan anggaran</p>



Kegiatan Pengelolaan
Kebijakan dan Koordinasi
Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan Anggaran Sebesar Rp 109.562.900,00, Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Dengan Anggaran Rp 166.501.200,00, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Sebesar Rp 42.870.600,00, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 49.944.200,00 dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 21.175.000,00

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Anggaran Sebesar Rp Rp 256.546.500,00 dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dengan Anggaran Rp Rp 419.198.774,00, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Sebesar Rp Rp 147.112.700,00


3.1.1.3. Data Dukung Capaian persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan

Gambar III.3

Program Penataan Organisasi

Kegiatan mencakup seluruh program yang ada di biro hukum, kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>sosialisasi pergub no 17 tahun 2025, pakaian dinas ASN</p>
		<p>Peta Jabatan</p>
		<p>Kegiatan penunjang saran dan parasarana biro umum</p>

		<p>Persiapan kegiatan sarana dan parasaran biro umum</p>
--	---	--

Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Anggaran Sebesar Rp 276.847.250,00 dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dengan Anggaran Rp 477.136.350,00

3.1 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kebijakan Daerah di bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	95 %	97,00	100 %	31.941.892.825	26.865.440.304	84,11	5.076.452.521
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah di bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa	95 %	100	100%	1.305.136.374	867.628.854	66,48	437.507.520
3	Meningkatnya Kebijakan Daerah di Bagian Penataar Organisasi	Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan:	95 %	100	100%	625.791.850	564.022.288	90,13 %	61.769.562
4	Meningkatnya Tata Kelola Internal PD Setda	Survey Pelayanan Internal setda	78,05	91,46	100%	92.978.723.834,17	81.023.754.535	91,46 %	11.954.969.299
Total Belanja						126.851.544.883,17	109.320.845.981,00	81,96 %	17.530.698.902

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran pada Sekretariat Daerah sebesar dengan target sebesar 126.851.544.883,17 dengan realisasi sebesar 109.320.845.981,00 sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 17.530.698.902 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi.
- Efisiensi Belanja Modal.
- Efisiensi Belanja Tak Terduga.
- Efisiensi belanja Transfer.
- Efisiensi Belanja Hibah.

3.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/29/ITDA-LHPE/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2025 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/O UTPUT	PELAKSANAAN				LINK BUKTI DUKUNG
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Dokumen Perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>cross cutting</i>)	Mengupload dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen	Januari s/d April 2024	selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1HQr1Qn7eZFS1U0iUCYQRVf94W3zvoHOq/view?usp=drive_link
2	Memantau capaian kinerja secara berkala	Mengupload dokumen Dokumen evaluasi	1 Dokumen	Setiap akhir triwulan	selesai	√	√	√	√	https://drive.google.com/file/d/1Hwvc3Zr6pWB8cioJlr3-f68mGUGIYYK/view?usp=drive_link
3	Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja	Pelaksanaan Rapat	1 x rapat	Maret 2024	selesai					https://drive.google.com/file/d/1K4z1MgHeaFnzk-FL5ex3U6LqhQFUVSoz/view?usp=drive_link
4	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Seluruh unit/satuan kerja yang terkait sudah saling berkoordinasi	2 x Rapat	Maret 2024	selesai		√			https://drive.google.com/file/d/1wwNZuZpv8IsOCCEyypajcZ20XT89tg14/view?usp=drive_link
5	Memformalkan laporan kinerja	Seluruh dokumen laporan kinerja sudah di selesaikan	1 Dokumen	Januari 2024		√				https://drive.google.com/file/d/1OvYto6vJOVP-aUd1gly1baVs4h7Pf0xQ/view?usp=drive_link
6	Melakukan reuiu laporan kinerja secara berjenjang	Pelaksanaan (rapat intern) bersama Bidang Terkait.	1 Berkas	Februari 2024	selesai		√	√		https://drive.google.com/file/d/1VRiFgWkeirT-xTp4MooNiS-78jd_iE8M/view?usp=drive_link
7	Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Belum menemukan data pebanding Laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level								https://drive.google.com/file/d/1_TYXU51tGR0h0M-Fgo0Mz8e85mnGDPD/view?usp=drive_link

		nasional/internasional								
8	Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan	Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para pimpinan (rapat intern)	2 x Rapat	Setiap akhir Triwulan	selesai	√	√	√	√	https://drive.google.com/file/d/1VRiFgWkeirT-xTp4MooNIS-78jd_iE8M/view?usp=drive_link
9	Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para seluruh pegawai yang terkait (rapat intern)	2 x Rapat	Februari	selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1wwNZuZpv8IsOCCEyypajcZZ0XT89tg14/view?usp=drive_link
10	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang belum memadai	Melakukan sosialisasi Evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	27 Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/file/d/1fqYEQTLaTy0tIHH00Owaal00oBCdNL/view?usp=drive_link
11	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah kami proses bertahap	1 berkas	1 berkas	Selesai	√				https://drive.google.com/file/d/10ltIsK_dNIHBFYa9rCXOTga1ZJd36f82/view?usp=drive_link
12	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja .	1 berkas	1 berkas	Selesai	√				https://drive.google.com/file/d/10ltIsK_dNIHBFYa9rCXOTga1ZJd36f82/view?usp=drive_link

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi Sipena sakti , untuk mempermudah kinerja dalam penginputan capaian kinerja Perangkat Daerah

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. -

3.5 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Sekeratraiat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya

CONTOH :



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase kebijakan daerah di bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum tercapai dengan presentase 97,00%, Persentase kebijakan daerah di bagian perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa tercapai dengan presentase 100,00%, Persentase kebijakan daerah di bagian penataan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan persentase 100%., dan Survey Pelayanan Internal setda tercapai 91,46 %.
2. Tidak tercapainya indikator kinerja pada lingkungan Sekretariat Daerah dikarenakan adanya *refocusing anggaran* Terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III (peraturan/kebijakan dari pusat) agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan.
3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data kegiatan untuk bahan penentuan sasaran,

tersedianya anggaran terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari Biro-biro untuk mendukung program kegiatan pada Sekretariat Daerah dalam upaya kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan Budaya Kerja (area Manajemen SDM)
2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan Memaksimalkan peran masyarakat dalam penanganan hukum (penegakan hukum) adalah kunci terciptanya keadilan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan mitra strategis aparat penegak hukum.
3. Memaksimalkan peran Masyarakat dalam upaya memantau proses hukum (penegakan hukum) melalui lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat di Babel Disamping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lembaga penegak hukum, dan masyarakat terhadap permasalahan Masyarakat didorong aktif melaporkan dugaan tindak pidana,

- pelanggaran hukum, atau tindakan maladministrasi kepada pihak berwenang atau lembaga pengawas seperti Ombudsman.
4. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi.
 5. Memaksimalkan peran ASN dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam hal peningkatan efisiensi layanan berbasis teknologi (e-government), transparansi kebijakan, dan penguatan partisipasi publik.
 6. Perlunya payung hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pelayanan dan perlindungan sangat krusial sehingga ada kejelasan aturan dalam pemberian pelayanan, perlindungan maupun aduan publik dan kerentanan kelompok tertentu.
 7. Memberikan penanaman nilai-nilai di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada penguatan budaya kerja profesional, berintegritas, dan berbasis pada Core Values ASN **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
 8. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam melibatkan kombinasi antara pelatihan berkelanjutan, penghargaan, penciptaan budaya kerja yang positif, dan penempatan individu yang tepat sesuai keahlian

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat Daerah secara lebih intensif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memujudkan kebijakan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
2		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
		Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	B 67,00	B 67,50	B 68,00	B 68,50

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY AFRIYANTO

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formulasi Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	- Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	95%	(Jumlah Kebijakan yg terimplementasi / Jumlah Kebijakan Daerah yang dikeluarkan)x100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket.
1.	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	1. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp. 3.075.959.600	
		2. Kesejahteraan Rakyat	Rp. 35.812.645.925	
		3. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.025.034.600	
		4. Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 796.012.000	
		5. Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 1.218.214.674	
		6. Penataan Organisasi	Rp. 1.032.369.600	
Jumlah			Rp. 42.960.236.399	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.060.595.940	
Jumlah		Rp. 98.060.595.940	

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. YUNAN HELMI.,M.Si

Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. YUNAN HELMI.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	95%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	Penataan Organisasi	Rp. 1.032.369.600	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.060.595.940	

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


Drs. YUNAN HELMI.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disertai dengan Berita Acara



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY AFRIYANTO
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2024

<p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>SUGITO</p>	<p>PIHAK PERTAMA, Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>FERY AFRIYANTO Pembina Utama Madya NIP. 19700409 199603 1 004</p>
--	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	- Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	99,05%	(Jumlah Kebijakan yg terimplementasi / Jumlah Kebijakan Daerah yang dikeluarkan)x100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket.
1.	Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	1. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp. 2.760.097.259	
		2. Kesejahteraan Rakyat	Rp. 66.265.211.400	
		3. Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 860.159.200	
		4. Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 861.099.868	
		5. Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 1.535.227.820	
		6. Penataan Organisasi	Rp. 1.268.159.450	
Jumlah			Rp. 73.549.954.997	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)


NO	Program	Anggaran	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 94.635.796.260	
Jumlah		Rp. 94.635.796.260	

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


HERLY ARIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. YUNAN HELMI.,M.Si
Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Juli 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. YUNAN HELMI.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	- Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	95%	(Jumlah Kebijakan Daerah yg ditetapkan/Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	Penataan Organisasi	Rp. 753.980.600,-	

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.92.978.723.834.17	

Pangkalpinang, Juli 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Drs. YUNAN HELMI.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025

LAPORAN MONEV TW IV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH BIRO ORGANISASI TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian		
1.	Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kebijakan Daerah yang dibagikan Penataan Organisasi yang ditetapkan	Persentase Kebijakan Daerah Penataan Organisasi yang ditetapkan	TW I 20%	20%	Meningkatkan Usulan Kebijakan daerah di bidang penataan organisasi	Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Penataan Organisasi yang disusun	TW I 40%	40%	1. Meningkatkan rumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan provinsi yang dikeluarkan 2. Meningkatkan rumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota yang dikeluarkan 3. Meningkatkan rumusan kebijakan analisis jabatan yang dikeluarkan	1. Persentase rumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan provinsi yang dikeluarkan 2. Persentase rumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota yang dikeluarkan 3. Persentase rumusan kebijakan analisis jabatan yang dikeluarkan	TW I 20%	20%		
				TW II 40%	40%			TW II 40%	40%			TW III 60%	60%	TW III 60%	60%
				TW III 75%	75%			TW III 60%	60%	1. Meningkatkan rumusan kebijakan tatalaksana pemerintahan yang dikeluarkan 2. Meningkatkan rumusan kebijakan peningkatan pelayanan publik yang dikeluarkan 3. Meningkatkan pelayanan internal biro organisasi	1. Persentase rumusan kebijakan tatalaksana pemerintahan yang dikeluarkan 2. Persentase rumusan kebijakan peningkatan pelayanan publik yang dikeluarkan 3. Survey kepuasan pelayanan internal Biro Organisasi	TW I 20%	20%		
				TW IV 95%	95%			TW IV 80%	80%			TW II 40%	40%	TW III 60%	60%

										1. Meningkatkan rumusan kebijakan akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan 2. Meningkatkan rumusan kebijakan budaya kerja yang dikeluarkan 3. Meningkatkan rumusan kebijakan reformasi birokrasi yang dikeluarkan	1. Persentase rumusan kebijakan akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan 2. Persentase rumusan kebijakan budaya kerja yang dikeluarkan 3. Persentase rumusan kebijakan reformasi birokrasi yang dikeluarkan	TW I 20%	20%
												TW II 40%	40%
												TW III 60%	60%
												TW IV 80%	80%

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. Dra. ELLYANA, M.Pd
Pembina Utama Muda/Ivc
NIP. 19660312.199203.2.006

LAPORAN MONEV

TRIWULAN IV TAHUN 2025

BIRO HUKUM

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Fasilitasi Penyusunan Per-UU-an	Persentase rumusan kebijakan penataan perundang-undangan	TW 1 = 15% TW II = 35% TW III = 25% TW IV = 90%	TW 1 = 15% TW II = 35% TW III = 25% TW IV = 100%	Tersusunnya produk hukum pengaturan	Jumlah Produk hukum pengaturan yang disusun	TW 1 = 15% TW II = 30% TW III = 35% TW IV = 95%	TW 1 = 20% TW II = 45% TW III = 90% TW IV = 100%
										Tersusunnya produk hukum penetapan	Jumlah Produk hukum penetapan yang disusun	TW 1 = 25% TW II = 25% TW III = 25% TW IV = 95%	TW 1 = 25% TW II = 25% TW III = 25% TW IV = 100%
										Tersusunnya pendokumentasian dan naskah hukum lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	TW 1 = 20% TW II = 30% TW III = 30% TW IV = 95%	TW 1 = 20% TW II = 30% TW III = 30% TW IV = 100%
										Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum Kab/Kota	Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	TW 1 = 20% TW II = 25% TW III = 25% TW IV = 95%	TW 1 = 20% TW II = 25% TW III = 25% TW IV = 100%
						Fasilitasi Bantuan Hukum		TW 1 = 0% TW II = 25% TW III = 70% TW IV = 90%	TW 1 = 0% TW II = 25% TW III = 80% TW IV = 100%	Terlaksananya penyelesaian masalah hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	TW 1 = 0% TW II = 50% TW III = 0% TW IV = 95%	TW 1 = 0% TW II = 50% TW III = 0% TW IV = 100%
										Terlaksananya penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	Terlaksananya penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	TW 1 = 0% TW II = 25% TW III = 50% TW IV = 95%	TW 1 = 0% TW II = 25% TW III = 55% TW IV = 100%

LAPORAN MONEV

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG JASA SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN 4 TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
	Diisi Tujuan PD	diisi Sasaran pada PK es 2 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 3 /Fungsional	Diisi Target PK Ka PD TH 2024		diisi Sasaran pada PK es 3 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 3 /Fungsional	Diisi Target PK Es 3 /Fungsional TH 2025		diisi Sasaran pada PK es 4 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 4 /Fungsional	Diisi Target PK Es 4 /Fungsional TH 2025	
1				TW 1		Meningkatkan Usulan	Persentase Usulan	TW 1 20% 25%		Meningkatkan Rumusan	Persentase Rumusan	TW 1 15% 25%	
				TW 2		Kebijakan Pengadaan	Kebijakan Daerah	TW 2 40% 50%		Kebijakan Pengelolaan	Kebijakan Pengelolaan	TW 2 30% 50%	
				TW 3		Barang dan Jasa	dibidang Pelayanan	TW 3 60% 75%		Barang/Jasa yang dikeluarkan	Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	TW 3 45% 75%	
				TW 4			Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	TW 4 80% 100%				TW 4 60% 100%	
2										Meningkatkan Rumusan	Persentase Rumusan	TW 1 15% 25%	
										Kebijakan	Kebijakan	TW 2 30% 50%	
										Pengelolaan Layanan	Pengelolaan Layanan	TW 3 45% 75%	
										Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	TW 4 60% 100%	
3										Meningkatkan rumusan	Persentase rumusan	TW 1 15% 25%	
										kebijakan	kebijakan	TW 2 30% 50%	
										pembinaan dan advokasi	pembinaan dan advokasi	TW 3 45% 75%	
										pengadaan barang dan	advokasi pengadaan	TW 4 60% 100%	

LAPORAN MONEV
RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 2 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
	Diisi Tujuan PD	diisi Sasaran pada PK es 2 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 3 /Fungsional	Diisi Target PK Ka PD TH 2025		diisi Sasaran pada PK es 2 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 2 /Fungsional	Diisi Target PK Es 2 /Fungsional TH 2025		diisi Sasaran pada PK es 3 /Fungsional	diisi Indikator kinerja pada PK es 3 /Fungsional	Diisi Target PK Es 3 /Fungsional TH 2025 Target 75 %	
1.						Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	TW 1 20	20.57	Meningkatnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dikeluarkan	Persentase Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dikeluarkan	TW 1 15	13.33
								TW 2	40	Meningkatnya rumusan fasilitasi kerja sama yang dikeluarkan	Persentase Rumusan kebijakan Fasilitasi kerja Sama yang dikeluarkan	TW 1 15	12.00
												TW 2 35	23.33
												TW 3 50	50.00
												TW 4 75	70 %
												TW 3 60	65.88 %
												TW 4 80	103.56 %
												TW 1 15	36.36
												TW 2 35	54.55
												TW 3 50	63.64
												TW 4 75	100 %

Pangkalpinang, Januari 2026
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

KURNIAWAN, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19731006 200003 1 002

LAMPIRAN III
 SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR
 : 005/23/VI TANGGAL : 1 Juli 2025

LAPORAN MONEV
RENCANA AKSI KINERJA BIRO UMUM TRIWULAN IV TAHUN 2025



No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Sasaran strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 2 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target		Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Capaian
						Meningkatnya Pelayanan Internal PD Setda	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda	TW 1	17%	28.21%	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Setda	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda (Adm. Keuangan Perangkat Daerah)	TW 1	21%	28.29%
							TW 2	38%	49.40%	TW 2			42%	49.50%	
							TW 3	61%	70.62%	TW 3			63%	71.25%	
							TW4	84%	100.55 %	TW4			84%	100.32 %	
												Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda (Adm. Keuangan Operasional KDH dan WKDH)	TW 1	21%	28.29%
													TW 2	42%	49.50%
													TW 3	63%	71.25%
													TW4	84%	100.32 %
											Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Dan Protokol	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	TW 1	21%	28.44%
													TW 2	42%	56.47%
													TW 3	63%	82.76%
													TW4	84%	113.13%
												Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	TW 1	21%	28.03%
													TW 2	42%	56.22%
													TW 3	63%	84.36%
													TW4	84%	113.17%
												Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	TW 1	21%	28.03%
													TW 2	42%	56.22%
													TW 3	63%	84.36%
													TW4	84%	114.92%
												Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga Setda	TW 1	21%	28.26%
													TW 2	42%	56.49%
													TW 3	63%	85.42%
													TW4	84%	115.98%

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 700/ 29 /ITDA-LHPE/2025
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH PROV.KEP.BANGKA BELITUNG
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Nomor : 700/ 29 /ITDA-LHPE/2025
Tanggal : 29 SEPTEMBER 2025**

Disusun oleh :

- 1. Drs.AKHMAD MOKHTAR / Pengendali Teknis
NIP. 197404021993021001**
- 2. RENI PEBRIANTI, S.Sos / Ketua Tim
NIP. 198302092011012003**
- 3. DJUMAIDI ISKANDAR, S. E./ Anggota Tim
NIP. 197701112012121001**
- 4. ASWIN AZIZ, A.Md./ Anggota Tim
NIP. 199006132014021001**
- 5. JOKO NURMANSYAH, A.Md./ Anggota Tim
NIP. 198503102009041002**

**PANGKALPINANG
2025**

**TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM PANGKALPINANG TELP/ FAX (0717) 434693 EMAIL: sekretariatLHPE@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

OBJEK PEMANTAUAN : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 700/ 29 /ITDA-LHPE/2025
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. PENDAHULUAN

1. Landasan Pemantauan : Surat Perintah Tugas
Nomor : 700/26/TL-ITDA/2025
Tanggal 20 Agustus 2025
2. uang Lingkup Pemantauan : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung atas Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2024
3. Nomor dan Tanggal LHP yang
akan ditindaklanjuti : - Nomor 700 /104/LHE-ITDA/2025
Tanggal 28 April 2025
4. Status Tindak Lanjut **Sebelum** : **T = 1 ,R = 12, TTL = 0, D = 0, B = 0**
Pemantauan
 - a. Temuan (T)
 - b. Rekomendasi/Saran (R)
 - c. Selesai (S)
 - d. DalamProses/ (D)
Tindak Lanjut
 - e. Belum Sesuai Rekomendasi
Belum Ditindaklanjuti (B)
5. Waktu Pemantauan : 25 s.d. 01 September 2025

6. Data Umum SKPD

a.	Nama Satuan Kerja	:	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b.	Nama Kepala Satuan Kerja	:	Fery Apriyanto
c.	Jabatan Struktural	:	Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
d.	No. Telp./Fax. Satuan Kerja	:	-
e.	Nama Koordinator Tindak Lanjut Satuan Kerja/ Jabatan/No. Telp/No. HP	:	Renal Winanta, S.STP.,M.M /Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Petugas Pemantau

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs.AKHMAD MOKHTAR NIP. 197404021993021001	Pengendali Teknis
2.	RENI PEBRIANTI, S.Sos NIP. 198302092011012003	Ketua Tim
3.	DJUMAIDI ISKANDAR, S. E. NIP. 197701112012121001	Anggota Tim
4.	ASWIN AZIZ, A.Md. NIP. 199006132014021001	Anggota Tim
5.	JOKO NURMANSYAH, A.Md. NIP. 198503102009041002	Anggota Tim

B. URAIAN HASIL PEMANTAUAN

B.1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Nomor : 700/104/LHE-ITDA/2025 Tanggal 28 April 2025

Sebagai berikut :

1.	➤ Nomor urut dalam LHP	: 1
	➤ Judul Temuan dan Kode	: Hasil evaluasi atas Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
	➤ Rekomendasi dan Kode	: Berdasarkan uraian pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : a. Dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (cross cutting); b. Memantau capaian kinerja secara berkala; c. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja; d. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. e. Memformalkan laporan kinerja; f. Melakukan reviu laporan kinerja secara berjenjang; g. Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional; h. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan; i. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; j. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang belum memadai;

- k. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
- l. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

➤ Tindak lanjut berupa :

- Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, meliputi :
 - a. Mengupload dokumen Renstra dan Renja
TERLAMPIR:
 - Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024
 - b. Mengupload dokumen Dokumen evaluasi
TERLAMPIR:
 - Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2024
 - c. Pelaksanaan Rapat
TERLAMPIR:
 - Dokumentasi/Foto pelaksanaan rapat
 - d. Seluruh unit/satuan kerja yang terkait sudah saling berkoordinasi
TERLAMPIR:
 - Dokumentasi/Foto pelaksanaan rapat
 - e. Seluruh dokumen laporan kinerja sudah di selesaikan
TERLAMPIR:
 - laporan kinerja Sekretaris Daerah Prov.Kep.Babel Tahun 2024
 - f. Pelaksanaan (rapat intern) bersama Bidang Terkait.
TERLAMPIR:
 - Surat undangan perihal pembahasan Dokumen pada kegiatan verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
 - g. Belum menemukan data pebanding Laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja

dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

TERLAMPIR:

- Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - Tabel perbandingan Tar Kinerja PD dengan nasional Tahun 2024
- h. Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para pimpinan (rapat intern)
- TERLAMPIR:
- Surat undangan perihal pembahasan Dokumen pada kegiatan verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- i. Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para seluruh pegawai yang terkait (rapat intern)
- TERLAMPIR:
- Dokumentasi/Foto pelaksanaan rapat
- j. Melakukan sosialisasi Evaluasi akuntabilitas kinerja
- TERLAMPIR:
- SERTIFIKAT a.n. Ahmad Idiar Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025(Isu Strategis dan Arah Kebijakan) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- k. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah kami proses bertahap
- TERLAMPIR:
- Rencana Aksi Tindak Lanjut Terlampir
- l. Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- TERLAMPIR:
- Rencana Aksi Tindak Lanjut Terlampir

➤ Total Temuan Setoran (Rp)	: -
➤ Jumlah total setoran yang sudah dibayar sebelum pemantauan (Rp)	: -
➤ Realisasi Penyetoran Saat pemantauan (Rp)	: -
➤ Tanggal Riil Setor	: -
➤ Tanggal Menerima Bukti Setor	: -
➤ Jumlah Sisa yang belum setor setelah pemantauan (Rp)	: -
➤ Status Tindak Lanjut Setelah Pemantauan	: -
➤ Alasan masih dalam proses atau belum dapat ditindaklanjuti	: -
➤ Tanggal Rencana Penyelesaian Tindak lanjut	: -
➤ Nama Koordinator TL	: Renal Winanta, S.STP.,M.M

A. KESIMPULAN

Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

C.1 atas Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					TTL	%	D	%	B	%
A	B	C	D	e	f	$g = \frac{g}{f} \times 100\%$	H	$i = \frac{i}{h} \times 100\%$	j	$k = \frac{k}{j} \times 100\%$
1.	Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	2025	1	12	12	100	0	0,00	0	0,00

Demikian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 29 September 2025

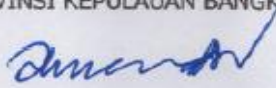
Yang Melaporkan:

1. Drs.AKHMAH MOKHTAR / Pengendali Teknis
NIP. 197404021993021001
2. RENI PEBRIANTI, S.Sos
NIP. 198302092011012003
3. DJUMAIDI ISKANDAR, S. E.
NIP. 19770112012121001
4. ASWIN AZIZ, A.Md./ Anggota Tim
NIP. 199006132014021001
5. JOKO NURMANSYAH, A.Md.
NIP. 198503102009041002

()
 ()
 ()
 ()
 ()

Mengetahui

Pt. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IMAM KUSNADI, S.E, M.AB, CfrA, CRGP, CGCAE
NIP. 197506092008121001

RENCANA AKSI TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHE AKIP INTERNAL SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS /PROGRESS PENYELESAIAN	REALISASI				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	Dokumen Perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>cross cutting</i>)	Mengupload dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen	Januari s/d April 2024	selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1HQ1Cn7eZTS1UOILCYQRV94W3x0eHCq/view?usp=drive_link
2	Memantau capaian kinerja secara berkala	Mengupload dokumen Dokumen evaluasi	1 Dokumen	Setiap akhir triwulan	selesai	√	√	√	√	https://drive.google.com/file/d/1Rwv32r5pWBBcblj3_f58mGUGIMUvIw7usp=drive_link
3	Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja	Pelaksanaan Rapat	1 x rapat	Maret 2024	selesai					https://drive.google.com/file/d/1K4JIMg1eaFnk-FL5ex3U6u4CFUY5oa/view?usp=drive_link
4	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Seluruh unit/satuan kerja yang terkait sudah saling berkoordinasi	2 x Rapat	Maret 2024	selesai		√			https://drive.google.com/file/d/1wW2u2p810C6fyp9jz20X789g14/view?usp=drive_link
5	Memformalkan laporan kinerja	Seluruh dokumen laporan kinerja sudah di selesaikan	1 Dokumen	Januari 2024		√				https://drive.google.com/file/d/1OvY7o6u0Vp-aUd1gYzbaVskh7PDKQ/view?usp=drive_link
6	Melakukan revaluasi laporan kinerja secara berjenjang	Pelaksanaan (rapat intern) bersama Bidang Terkait.	1 Berkas	Februari 2024	selesai		√	√		https://drive.google.com/file/d/1V8EgWkERTx7p4MeoHIS78HJ_E8M/view?usp=drive_link

7	Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Belum menemukan data perbandingan Laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	2 x Rapat	Setiap akhir Triwulan	selesai	√	√	√	√	https://drive.google.com/file/d/1TYXU51KGR0M4H-Fgo0MdsB3mmGDDP/view?usp=drive_link
8	Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan	Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para pimpinan (rapat intern)	2 x Rapat	Februari	selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1V8ifgVksair-xTb4MooKIS78jd_@BM/view?usp=drive_link
9	Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Dalam proses laporan kinerja sudah melibatkan para seluruh pegawai yang terkait (rapat intern)	2 x Rapat	Februari	selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1wvNzUz8f8tDC53yp9j220XT89ngL4/view?usp=drive_link
10	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang belum memadai	Melakukan sosialisasi Evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	27 Agustus 2024	Selesai		√			https://drive.google.com/file/d/1tYFYCTLTV0tH-H000Dwaa0D68C8tU/view?usp=drive_link
11	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah kami proses bertahap	1 berkas	1 berkas	Selesai	√				https://drive.google.com/file/d/1d1sC_dh1h8rtag-rOX07ga1Zd38f82/view?usp=drive_link
12	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja	Melaksanakan Evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1 berkas	1 berkas	Selesai	√				https://drive.google.com/file/d/10l8kK_dNH87y9rCXOTga1Zd36f82/view?usp=drive_link

Pangkalpinang, September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KEP. BANGKA BELITUNG


PERYA PRIYAWAN
NIP. 19700409 199603 1 004

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Scan Piagam Penghargaan



